

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayanan di sektor pendidikan merupakan salah satu pelayanan publik yang menjadi urusan wajib bagi pemerintah daerah. Dan sekarang ini sektor pendidikan mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat dengan mengalokasikan anggaran 20% dari APBN. Dengan anggaran tersebut diharapkan bisa mewujudkan program wajib belajar dua belas tahun serta mengurangi angka anak putus sekolah. Beberapa daerah sudah mulai membebaskan biaya SPP dan buku, perbaikan fasilitas gedung sekolah serta perbaikan kesejahteraan guru. Upaya ini tidak terlepas dari kemampuan anggaran setiap daerah.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa sektor pendidikan adalah salah satu sektor yang menjadi urusan wajib pemerintah daerah. Kementerian Pendidikan Nasional sebagai bagian pemerintah pusat akan membantu provinsi dan kabupaten/kota dalam pembiayaan pembangunan sektor pendidikan melalui tiga pola pendanaan DAK, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, sampai pemerintah daerah mampu memenuhi kebutuhan pembiayaan pendidikan secara mandiri. Amanat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang

menyatakan bahwa warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar dan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa dipungut biaya; dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 bidang pendidikan menyatakan Penetapan kebijakan operasional pendidikan di provinsi, kabupaten/kota.

Upaya pemerintah untuk memperbaiki pelayanan pendidikan dasar dalam lingkup dari studi kebijakan publik masih dihadapkan pada persoalan seperti tidak meratanya kesempatan, rendahnya kualitas dan relevansi pendidikan, serta lemahnya manajemen penyelenggaraan pendidikan. Dalam lingkup studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang atau sektor, seperti bidang politik, hukum, pendidikan, pertanian, keamanan, luar negeri dan sebagainya. Disamping itu, dilihat dari hirarkinya, kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional, maupun lokal, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah provinsi, keputusan Gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan Bupati/Walikota (Subarsono, 2005).

Untuk mencapai tekat pemerintah tersebut, pemerintah pusat dan daerah dituntut untuk melakukan berbagai program pembangunan pendidikan dengan memprioritaskan alokasi anggaran pada sektor pendidikan dimana tertuang pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No. 20, 2003 tentang Sisdiknas, dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidik kedinasan mendapat alokasi minimal 20 % dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan

daerah (APBN dan APBD). Oleh karena itu, secara sederhana, makin besar penerimaan negara dan daerah maka semakin besar pula alokasi dana anggaran untuk sektor pendidikan. Sehingga pelayanan di sektor pendidikan menjadi salah satu pelayanan publik yang sudah menjadi urusan wajib bagi pemerintah daerah. Dengan adanya alokasi seminimalnya 20% dari APBN dan APBD maka anggaran tersebut diharapkan dapat mewujudkan program wajib belajar sembilan tahun serta mengurangi angka anak putus sekolah. Program tersebut dapat terwujud apabila ada koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah meskipun setiap daerah mempunyai wewenang sendiri untuk mengatur daerahnya masing-masing termasuk pada sektor pendidikan. Anggaran pendidikan sebesar 20% yang diambil dari APBN dan APBD ini dikenal dengan istilah Dana Alokasi Khusus (DAK).

Di sektor pendidikan, pelimpahan wewenang dan anggaran yang terkait dengan dekonsentrasi dilakukan oleh Kemendiknas kepada Gubernur yang pelaksanaannya diserahkan oleh Gubernur kepada dinas pendidikan tingkat provinsi. Sementara itu pelimpahan kewenangan anggaran tugas pembantuan dilakukan oleh Kemendiknas kepada dinas pendidikan provinsi, atau dinas pendidikan kabupaten/kota, mengingat sebagian besar kewenangan bidang pendidikan dasar dan menengah telah diserahkan ke daerah, maka seharusnya penanganan sebagian besar masalah pendidikan termasuk pengalokasian dananya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Sehingga dimasa yang akan datang kemajuan dunia pendidikan nasional sangat tergantung pada perhatian daerah pada sektor pendidikan (Muqaddam, 2011).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kota Metro dan perkembangannya pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2012 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun 2001-2012

Tahun	APBD	Pertumbuhan (%)
2001	136.297.690.000	-
2002	176.697.010.000	29,64
2003	207.354.950.000	17,35
2004	177.360.960.000	-14,47
2005	199.343.720.000	12,39
2006	271.454.600.000	36,17
2007	306.987.595.314,65	13,09
2008	323.080.805.568,53	5,24
2009	392.270.848.633,09	21,42
2010	426.500.140.797,82	8,73
2011	513.712.195.551,65	20,45
2012	549.523.082.346,31	6,97

Sumber : Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (data diolah)

Pada Tabel 1 menunjukkan pertumbuhan APBD kota Metro dari tahun 2001-2012. Dalam data tersebut terlihat bahwa anggaran pendapatan belanja daerah di Kota Metro setiap tahunnya mengalami kenaikan, namun pada tahun 2004 mengalami penurunan sebesar 177.360.960.000 atau dalam presentasi pertumbuhannya turunan sebesar 14,47% dari tahun sebelumnya, penurunan APBD ini terjadi karena penurunan PAD yang dimiliki oleh kota Metro. Penurunan dari PAD tersebut berpengaruh secara langsung terhadap penurunan APBDnya. Dan pada tahun berikutnya anggaran pendapatan dan belanja daerah di Kota Metro mengalami kenaikan yang signifikan setiap tahunnya. Pada tahun 2012 anggaran pendapatan dan belanja daerah mencapai 549.523.082.346,31 atau mengalami kenaikan sebesar 6,97% dari tahun sebelumnya.

Pelaksanaan pendidikan di Kota Metro dalam upaya peningkatan mutu pendidikan dan kemampuan masyarakat dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2012 dapat dilihat pada perkembangan anggaran pendidikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Anggaran Pendidikan Sektor Pendidikan di Kota Metro Tahun 2001-2012

Tahun	Anggaran Pendidikan	Pertumbuhan (%)
2001	3.603.940.000	-
2002	6.758.330.000	87,53
2003	8.680.160.000	28,44
2004	50.170.834.895	477,99
2005	52.082.655.190	3,81
2006	70.949.662.249	36,23
2007	89.816.669.308	26,59
2008	110.825.647.608	23,39
2009	122.334.203.573	10,38
2010	160.974.268.455	31,59
2011	197.628.014.051	22,77
2012	220.807.261.888	11,73

Sumber : DJPK dan Disdikpora Kota Metro

Seberapa besar komitmen pemerintah untuk meningkatkan kecerdasan bangsa terhadap pembangunan pendidikan antara lain tercermin dari anggaran pendidikan seperti diterapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 dan dipertegas dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 20 Pasal 49 tahun 2003 tentang Sisdiknas, bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidik kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN dan APBD. Pada Tabel 2 menunjukkan pertumbuhan anggaran pendidikan di Kota Metro. Dalam tabel tersebut terlihat bahwa anggaran pendidikan setiap tahun mengalami peningkatan yang sangat konsisten. Pada tahun 2012 anggaran pendidikan meningkat sebesar 11,73% atau sebesar 220.807.261.888. Anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk

pembangunan pendidikan ini bertujuan untuk menunjang kelangsungan pendidikan pada program pemerintah yaitu wajib belajar 12 tahun.

Di bidang pendidikan, Kota Metro pada tahun 2012 memiliki sebanyak 4 TK Negeri dan 52 TK swasta, 47 SD Negeri dan 8 SD swasta, 3 Madrasah Ibtidaiyah atau Islamic School Negeri dan 6 Madrasah Ibtidaiyah atau Islamic School Swasta, 10 SMP Negeri dan 13 SMP Swasta, 7 MTS/Madarasah Tsanawiyah swasta, 6 SMA Negeri dan 12 SMA Swasta, 1 MA/Madarasah Aliyah Negeri dan 6 MA/Madarasah Aliyah Swasta, 3 SMK Negeri dan 13 SMK Swasta dan 1 Perguruan Tinggi Negeri seperti STAIN Jurai Siwo dan 8 Perguruan Tinggi Swasta seperti Universitas Muhammadiyah Metro, STIPER Dharma Wacana, STISPOL Dharma Wacana, AKPER Dharma Wacana, STMIC Dharma Wacana, STIT Agus Salim, STKIP Dharma Wacana / STO, dan STAI Ma'arif (Metro Dalam Angka 2013).

Visi dan Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Visi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan adalah terselenggaranya layanan prima pendidikan dan kebudayaan nasional untuk membentuk insan indonesia yang cerdas dan berkarakter kuat. Sedangkan Misi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan dan kebudayaan, memperluas keterjangkauan layanan pendidikan dan kebudayaan, meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kebudayaan, mewujudkan kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan dan kebudayaan, menjamin kepastian atau keterjaminan memperoleh layanan pendidikan, melestarikan dan memperkuat bahasa dan kebudayaan Indonesia.

Tabel 3. Jumlah Sekolah Dasar, Guru dan Murid Negeri dan Swasta di Kota Metro Tahun 2001-2012

Tahun	Jumlah SD (unit)	Pertumbuhan (%)	Jumlah Guru (jiwa)	Pertumbuhan (%)	Jumlah Murid (jiwa)	Pertumbuhan (%)
2001	53	-	929	-	15115	-
2002	63	18,87	924	-0,54	16490	9,10
2003	53	-15,87	823	-10,93	15450	-6,31
2004	53	0	827	0,49	15399	-0,33
2005	63	18,87	830	0,36	16490	7,08
2006	63	0	905	9,04	16849	2,18
2007	54	-14,29	970	7,18	18307	8,65
2008	55	1,85	1002	3,30	16083	-12,15
2009	64	16,36	1173	17,07	17252	7,27
2010	62	-3,13	1147	-2,22	16859	-2,28
2011	64	3,23	1133	-1,22	17510	3,86
2012	64	0	1225	8,12	17943	2,47

Sumber : Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Metro
(data diolah)

Tabel 3 menunjukkan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar khususnya Sekolah Dasar (SD) di Kota Metro secara total pada tahun 2012 mencapai 64 unit sekolah , 1225 tenaga pengajar dan 17943 jumlah murid. Pada tahun 2010 jumlah sekolah mencapai 62 unit sekolah dan mengalami penurunan pertumbuhan sebesar 3,13% dari tahun sebelumnya dan jumlah guru sebesar 1147 tenaga pengajar dan mengalami penurunan sebesar 2,22% dari tahun sebelumnya sedangkan pada jumlah murid sebesar 16859 siswa atau mengalami penurunan sebesar 2,28% dari tahun sebelumnya. Pada jenjang pendidikan dasar di tingkat SD merupakan langkah awal dalam memperkenalkan ilmu pengetahuan dasar bagi setiap murid, yang selanjutnya diharapkan dapat melanjutkan di tingkat jenjang pendidikan yang lebih tinggi guna memenuhi kewajiban pendidikan dasar dua belas tahun, sebagaimana diperlihatkan di Tabel 4.

Tabel 4. Jumlah SMP, Guru dan Murid Negeri dan Swasta di Kota Metro Tahun 2001-2012

Tahun	Jumlah SMP (unit)	Pertumbuhan (%)	Jumlah Guru (jiwa)	Pertumbuhan (%)	Jumlah Murid (jiwa)	Pertumbuhan (%)
2001	22	-	702	-	8057	-
2002	25	13,64	701	-0,14	8562	6,27
2003	23	-8	677	-3,42	7497	-12,44
2004	23	0	677	0	7525	0,37
2005	23	0	775	14,48	8203	9,01
2006	29	26,09	872	12,52	8881	8,27
2007	25	-13,79	753	-13,65	8162	-8,10
2008	23	-8	832	10,49	8347	2,27
2009	31	34,78	1022	22,84	9787	17,25
2010	30	0	997	-2,45	9512	-2,81
2011	32	6,67	997	0	9986	4,98
2012	30	-6,25	997	0	9931	-0,55

Sumber : Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Metro
(data diolah)

Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Metro pada tahun 2001 secara keseluruhan mencapai 22 unit sekolah dan pada tahun 2012 mencapai 30 unit sekolah setelah mengalami penurunan pertumbuhan sebesar 6,25% dari tahun sebelumnya dan mengalami penurunan pada murid di tahun 2012 sebesar 9931 siswa atau sebesar 0,55% dari tahun sebelumnya. Sedangkan pada tenaga pengajar pada tahun 2007 mengalami penurunan yang sangat besar yaitu 753 guru atau sebesar 13,65% dari tahun sebelumnya. Pada jenjang SMP diharapkan dapat terciptanya sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik yang selanjutnya diharapkan dapat melanjutkan di tingkat jenjang pendidikan yang lebih tinggi sebagaimana diperlihatkan di Tabel 5.

Tabel 5. Jumlah SMA, Guru dan Murid Negeri dan Swasta di Kota Metro Tahun 2001-2012.

Tahun	Jumlah SMA (unit)	Pertumbuhan (%)	Jumlah Guru (jiwa)	Pertumbuhan (%)	Jumlah Murid (jiwa)	Pertumbuhan (%)
2001	16	-	482	-	6390	-
2002	15	-6,25	505	4,77	6547	2,46
2003	15	0	531	5,15	6665	1,80
2004	15	0	540	1,69	6770	1,58
2005	15	0	655	21,30	7519	11,06
2006	20	33,33	758	15,73	8268	9,96
2007	17	-15	666	-12,14	7021	-15,08
2008	17	0	655	-1,65	6706	-4,49
2009	23	35,29	847	29,31	8132	21,26
2010	24	4,35	889	4,96	8376	3,00
2011	25	4,17	870	-2,14	8438	0,74
2012	25	0	889	2,18	8684	2,92

Sumber : Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Metro
(data diolah)

Pada Tabel 5 menunjukkan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar khususnya Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Metro pada tahun 2012 secara total mencapai 25 unit sekolah. Dari data diatas terlihat bahwa pada tahun 2003, 2007, 2008 dan 2009 terjadi penurunan jumlah sekolah. Penurunan jumlah sekolah ini bisa terjadi karena adanya perbaikan pembangunan atau penggabungan sekolah. Dan Pada tahun 2009 pertumbuhan terbesar pada jumlah guru dan murid sebanyak 847 guru atau sebesar 29,31% dan 8132 murid atau sebesar 21,26% dari tahun sebelumnya. Sedangkan pada jenjang yang sama, pada jumlah sekolah, jumlah guru dan jumlah murid di SMK dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Jumlah SMK, Guru dan Murid Negeri dan Swasta di Kota Metro Tahun 2001-2012.

Tahun	Jumlah SMK (unit)	Pertumbuhan (%)	Jumlah Guru (jiwa)	Pertumbuhan (%)	Jumlah Murid (jiwa)	Pertumbuhan (%)
2001	17	-	607	-	7836	-
2002	15	-11,76	591	-2,64	7537	-3,82
2003	15	0	591	0	6705	-11,04
2004	15	0	590	-0,17	5946	-11,32
2005	15	0	591	0,17	5841	-1,77
2006	15	0	566	-4,23	5082	-12,99
2007	15	0	545	-3,71	5486	7,95
2008	15	0	577	5,87	6288	14,62
2009	15	0	592	2,60	6386	1,56
2010	16	6,67	641	8,28	7641	19,65
2011	16	0	530	-17,32	7164	-6,24
2012	16	0	639	20,57	7641	6,66

Sumber : Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Metro
(data diolah)

Pada jenjang SMK jumlah sekolah pada tahun 2010 mengalami pertumbuhan sebesar 6,67% dari tahun sebelumnya dan di tahun berikutnya tidak mengalami pertumbuhan. Pada jumlah guru di tahun 2011 mengalami penurunan yang sangat drastis mencapai 530 guru atau sebesar 17,32% dari tahun sebelumnya. Penurunan jumlah guru ini disebabkan oleh pensiunnya tenaga pengajar. Sedangkan pada jumlah murid di tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 7641 murid atau sebesar 6,66% dari tahun sebelumnya. Pada jenjang yang lebih tinggi yaitu Perguruan Tinggi data jumlah Universitas, mahasiswa dan dosen yang ada di Kota Metro dapat di lihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Jumlah Universitas, Dosen dan Mahasiswa Negeri dan Swasta di Kota Metro Tahun 2001-2012.

Tahun	Jumlah Universitas (unit)	Pertumbuhan (%)	Jumlah Dosen (jiwa)	Pertumbuhan (%)	Jumlah Mahasiswa (jiwa)	Pertumbuhan (%)
2001	5	-	228	-	1947	-
2002	5	0	324	42,11	5061	159,94
2003	5	0	335	3,40	2807	-44,54
2004	5	0	320	-4,48	3909	39,26
2005	5	0	324	1,25	4531	15,91
2006	5	0	251	-22,53	4843	6,88
2007	5	0	304	21,12	5971	23,29
2008	4	-20	354	16,45	6412	7,39
2009	3	-25	195	-44,92	3194	-50,19
2010	8	166,67	405	107,69	11356	255,54
2011	8	0	452	11,60	15271	34,48
2012	9	12,5	585	29,42	13910	-8,91

Sumber: Masing-masing Universitas (data diolah)

Pada jenjang yang lebih tinggi di tahun 2010 jumlah universitas mencapai 8 universitas baik negeri maupun swasta dan mengalami peningkatan mencapai 166,67% dari tahun sebelumnya dan di tahun berikutnya mengalami peningkatan. Di tahun yang sama yaitu tahun 2010 jumlah dosen dan mahasiswa mengalami pertumbuhan sebesar 107,69 % dan jumlah mahasiswa mencapai 255,54% dari tahun sebelumnya.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik permasalahan dalam penulisan ini adalah

1. Bagaimana kebijakan alokasi anggaran sektor pendidikan dalam upaya meningkatkan pendidikan di Kota Metro ?

2. Bagaimana tingkat keberhasilan pembangunan pendidikan dan sumber daya manusia di Kota Metro ?

C. Tujuan

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah

1. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan alokasi anggaran sektor pendidikan dalam upaya meningkatkan pendidikan di Kota Metro.
2. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan tingkat keberhasilan pembangunan pendidikan dari jumlah Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Melek Huruf (AMH) , Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Tingkat Kelulusan di Kota Metro.

D. Kerangka Pemikiran

Bicara tentang pendidikan, sebetulnya menyangkut usaha sadar untuk membantu anak menuju kedewasaan baik dari segi fisik maupun psikis, yang dilaksanakan oleh orang dewasa secara sadar dan penuh tanggung jawab. Pada saat ini pemerintah mengusahakan pendidikan mulai dari taman kanak-kanak sampai ke jenjang pendidikan tinggi untuk menjawab apa yang tersebut dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa (Ahmadi,2003).

Pendidikan adalah salah satu investasi sumber daya manusia yang penting. Untuk memperoleh pekerjaan yang layak seseorang membutuhkan keterampilan yang memadai. Keterampilan tersebut dapat diperoleh melalui pendidikan. Pengetahuan dan pengalaman menunjukkan bahwa terdapat koralasi positif antara pendapatan

dan tingkat pendidikan. Demikian pula tingkat pendidikan juga berpengaruh nyata terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara (Smeru, 2004) .

Kualitas pendidikan di Indonesia sangatlah rendah. Penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia antara lain adalah masalah efektifitas, efisiensi dan standarisasi pengajaran. Hal tersebut masih menjadi masalah pendidikan di Indonesia pada umumnya. Adapun permasalahan khusus dalam dunia pendidikan yaitu rendahnya sarana fisik, rendahnya kualitas guru, rendahnya kesejahteraan guru, rendahnya partisipasi siswa, rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan, rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan, dan mahal biaya pendidikan (Wati, 2010).

Tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan dasar masih sangat besar, lebih dari 90% sekolah dasar (SD) berstatus sebagai milik pemerintah. Sementara itu tekad untuk memperbaiki pelayanan pendidikan dasar masih dihadapkan pada persoalan tidak meratanya kesempatan, rendahnya kualitas dan relevansi pendidikan, serta lemahnya manajemen penyelenggaraan pendidikan. Untuk itu, pemerintah pusat dan daerah dituntut untuk melakukan berbagai program pembangunan pendidikan, dibarengi dengan tekad untuk memprioritaskan alokasi anggaran sektor pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No. 20, 2003 tentang Sisdiknas, dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan mendapat alokasi minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan daerah (APBN dan APBD) (Nina, 2004).

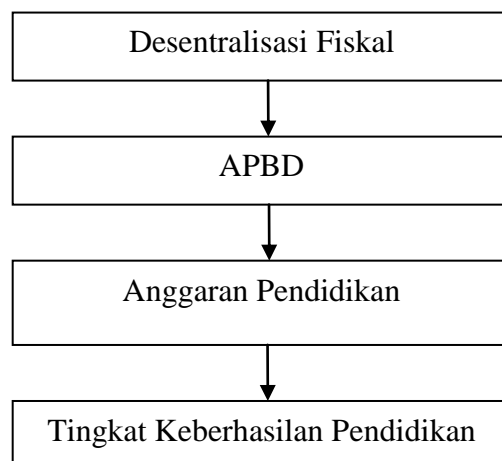
Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menyatakan bahwa setiap warga negara yang berusia 7 – 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Hal ini menimbulkan tanggung jawab bagi pemerintah untuk memberikan pelayanan pendidikan yang maksimal bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD/MI dan SLTP serta sederajat (Winarti, 2009).

Dengan adanya tujuan pendidikan mencerdaskan kehidupan bangsa secara bertahap memulai pembangunan pendidikan yang berkesinambungan pemerintah daerah terus berupaya dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan meningkatkan program pendidikan dua belas tahun. Dalam rangka memenuhi amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 yang menyebutkan bahwa “setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan” sehingga pemerintah juga melakukan berbagai upaya perluasan dan pemerataan kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

Tingkat pencapaian program pembangunan pendidikan dalam meningkatkan taraf pendidikan masyarakat yang bermutu dan berkesinambungan ini secara umum harus ditunjang dengan informasi mengenai pendidikan yang tertuang dalam indikator-indikator pendidikan. Indikator-indikator sektor pendidikan yang dapat memberikan informasi mengenai tingkat keberhasilan pembangunan pendidikan dan sumber daya manusia tercakup dalam : Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Melek Huruf (AMH), dan tingkat pendidikan (formal) yang ditamatkan. Indikator-indikator pendidikan tersebut dapat memberikan gambaran serta informasi tentang perkembangan pendidikan penduduk secara tepat dan

berkelanjutan. Melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), pemantauan perkembangan pendidikan dan penyajian indikator tersebut dapat dilakukan secara terus menerus dengan efektif dan efisien. Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) dilakukan setiap tahun dengan tujuan untuk memberikan gambaran kondisi sosial ekonomi masyarakat secara terpadu pada level nasional, regional bahkan sampai Kabupaten / Kota. Dengan demikian Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) ini disamping bertujuan untuk memberikan gambaran kondisi sosial ekonomi pada satu sektor kehidupan masyarakat, juga dapat menggambarkan keterkaitan antara sektor kehidupan di masyarakat.

Kadisdik Provinsi Lampung Drs. Tauhidi, M.M. mengatakan, dalam rangka mencerdaskan bangsa, pemprov telah mengalokasikan dana, baik melalui APBD maupun APBN, untuk pembangunan pendidikan di Lampung. Beberapa program yang telah dilaksanakan, yakni realisasi Wajib Belajar 9 Tahun; pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi dan tidak mampu; pembangunan dan renovasi sarana-prasarana pendidikan; pemberian insentif kepada guru; pembangunan ruang kelas baru (RKB); serta peningkatan sektor pendidikan formal dan informal. Program ini dicanangkan pemprov dalam rangka mencerdaskan bangsa dan sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Lampung dengan harapan sektor itu bisa menjadi andalan yang dibanggakan oleh Provinsi Lampung.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Gambar 1 menunjukkan kerangka pemikiran yang merupakan alur proses terjadinya anggaran pendidikan. Pada dasarnya desentralisasi fiskal merupakan penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepala daerah untuk melakukan pembelanjaan untuk memungut pajak sehingga dapat memperoleh pendapatan berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdapat sektor-sektor atau bidang yang dialokasikan pemerintah, seperti bidang kesehatan, pendidikan, sosial, perhubungan, olahraga, pertanian dan bidang lainnya. Pada program pembangunan pendidikan dengan memprioritaskan alokasi anggaran pada sektor pendidikan dimana tertuang pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No. 20, 2003 tentang Sisdiknas, dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidik kedinasan mendapat alokasi minimal 20 % dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan daerah (APBN dan APBD). Dengan mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 % pemerintah berharap dapat meningkatkan tingkat keberhasilan pendidikan seperti Angka Melek Huruf, Angka Partisipasi Sekolah, Angka Partisipasi Kasar, Angka Partisipasi Murni dan Tingkat kelulusan siswa di Kota Metro.